

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Responsivitas merupakan bentuk kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan. Responsivitas adalah indeks kinerja yang berorientasi pada proses. Daya tanggap digunakan menjadi alasan dalam indeks kinerja karena secara langsung dapat menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam mencapai visi dan tujuannya (terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat). (Muchlisin Riadi et al.,2022)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip good governance mengenai efektifitas fungsi pemerintahan itu sendiri. Pemerintah dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia secara efektif melalui pelayanan publik. Untuk mewujudkan hak dan kebutuhan dasarnya maka setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Kegiatan yang memenuhi harapan dan kebutuhan seluruh warga negara dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Salah satu aspek utama yang dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah peningkatan sarana kesehatan. Sarana kesehatan merupakan contoh barang publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pemberi layanan. Pemerintah harus mengambil langkah bijak agar layanan kesehatan dapat terdistribusikan secara lebih merata sehingga berdampak positif terhadap upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah

diharapkan tampil sebagai aktor utama dalam rangka penyediaan layanan kesehatan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah semakin menegaskan pentingnya arti responsivitas. Undang-Undang ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab pada daerah. Dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah akan lebih leluasa untuk menentukan kebijakan yang akan diambil yang sesuai dengan kebutuhan rakyat di daerah masing-masing. Adanya otonomi daerah telah menghasilkan cukup banyak reformasi dan perubahan. Contoh konkritnya tentang program-program inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi mudah diperoleh. Berbagai inisiatif baru dalam penyaluran pelayanan dasar, penyederhanaan perizinan, program-program untuk mengentaskan kemiskinan dapat ditemukan di berbagai daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang berkesinambungan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Levine dalam Dwiyanto (2006: 144) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik, yaitu:

1. Responsivitas, adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi, maupun tuntutan pengguna layanan.
2. Responsibilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip.

3. Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Responsivitas dalam salah satu konsep yang digunakan dalam pengukuran kinerja sangat diperlukan dalam pelayanan publik salah satunya adalah dalam pelayanan kesehatan. Hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dilulio dalam Agus Dwiyanto,2006).

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Tangkilisan, 2005: 177). Responsivitas berkaitan dengan kecepatan tanggapan yang dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan dapat di jadikan salah satu penentu sumber daya manusia suatu negara, karena melalui pelayanan kesehatan dapat diketahui apakah suatu negara berkembang atau tidak. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu menurunkan angka kematian ibu dan anak, Angka kematian dan kesakitan serta meningkatkan angka harapan hidup, dan status gizi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai sejak proses tumbuh kembang janin, Masa pertumbuhan anak hingga masa dewasa. Agar perkembangan anak baik dan sehat

diperlukan kecukupan nutrisi. Nutrisi yang tidak tepat baik dari kualitas dan kuantitasnya akan menyebabkan masalah gizi pada anak. Masalah gizi dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan serta kognitif anak. Saat ini masalah gizi masih menjadi permasalahan global pada negara berkembang maupun negara maju (Mega Asmat, 2018).

Upaya perbaikan gizi di Indonesia memiliki peranan penting dalam pembangunan kesehatan. Sumbangan gizi tidak hanya berarti bagi upaya pengurangan tingkat kesakitan dan kematian, Tetapi lebih untuk pertumbuhan dan pengembangan mutu manusia yang merupakan salah satu bagian dari tujuan dan hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia secara fisik yang akan menghasilkan tenaga kerja yang kuat dan terampil dalam menunjang terselenggaranya pembangunan di masa yang akan mendatang, akan tetapi apabila hal tersebut tidak terpengaruh maka akan menghasilkan tenaga kerja yang lemah dan tidak berdaya sehingga pembangunan tidak dapat berjalan, pada masa yang akan datang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Aceh, dr. Iman Murahman mengatakan, dalam kurun lima tahun terakhir grafik cakupan imunisasi dasar lengkap untuk anak Aceh terus mengalami penurunan. (<https://Dinkes.acehprov.go.id>)

Tabel 1.1
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Untuk Anak Aceh Selama 5 Tahun

Tahun				
2017	2018	2019	2020	2021
9,7%	58%	48,9%	42,7%	38,4%

Sumber Data: Dinkes.acehprov.go.id

Dapat dilihat dari tabel di atas Trend cakupan imunisasi dasar lengkap di Aceh terus mengalami penurunan tiap tahunnya, Sementara untuk rata-rata nasional cakupan IDL Aceh juga paling rendah berkisar 11,8 % saja dari target

nasional sebesar 54,6%. Bisa dibilang dari total 6.507 desa di Aceh, untuk cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) hanya 24,9% saja yang sudah lengkap imunisasi/tiga perempat. Masyarakat Aceh khususnya para ibu mereka takut karena imunisasi seperti vaksin haram yang di maksukkan ke dalam tubuh anak mereka. Dalam permasalahan imunisasi ini bidan desa yang bertugas di setiap desa yang ada di Kecamatan Gandapura mengaku agak kewalahan menyakinkan mayarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap bagi bayi, padahal bidan desa sudah melakukan beberapa upaya salah satunya adalah kelas imunisasi yang di adakan di posyandu, Bidan desa dan beberapa tenaga kesehatan lainnya melakukan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi sebulan sekali di posyandu setiap desa yang ada Di Gandapura secara bertahap-tahap. Akan tetapi hasilnya belum maksimal.

Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 mengenai suatu gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.
2. Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan

Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Posyandu merupakan langkah yang cukup strategis dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya. Untuk meningkatkan pembinaan posyandu sebagai pelayanan kesehatan dikelola untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dari petugas perlu di tumbuhkan. Untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi. Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan apabila dilaksanakan berbasis masyarakat seperti posyandu dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat menjangkau semua orang yang membutuhkan layanan tumbuh kembang anak ibu hamil dan ibu menyusui, nifas. Sasaran utama kegiatan posyandu balita adalah balita dan orang tuanya, ibu hamil ibu, ibu menyusui dan bayinya, serta wanita usia subur. Sedangkan yang bertindak sebagai pelaksana Posyandu adalah kader.

Posyandu di masyarakat bertujuan sebagai wadah untuk mendapatkan pelayanan dasar terutama dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu meliputi KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KB (Keluarga Berencana), Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare.

Qanun Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2012 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. di mana dalam qanun ini menjelaskan bahwa kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, Karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk.

Tabel 1.2
Data Kasus kesehatan ibu dan balita di Kecamatan Gandapura

No	Kasus	2020	2021	2022
1	Kematian bayi	2	7	8
2	Bumil Kekurangan energi Kronik	7	3	5
3	Gizi Buruk Bayi	5	6	4
4	Gizi Kurang Bayi	2	4	3
5	Gizi Buruk Balita	12	18	22
6	Gizi Kurang Balita	5	8	4
7	Stunting	50	24	20

Sumber Data: Pukesmas Gandapura

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa kasus masih terjadi di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Padahal pemerintah daerah sudah melakukan beberapa program untuk pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) beberapa di antaranya seperti:

- a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil.

Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil merupakan salah satu pelayanan gizi yang harus tetap dilakukan. Hal ini untuk mencukupi

kebutuhan zat besi selama kehamilan yang diperlukan untuk pertumbuhan janin, plasenta dan pencegahan pendarahan saat persalinan. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) di laksanakan di posyandu, apabila ibu hamil tersebut tidak datang maka bidan desa akan datang langsung ke rumah ibu hamil tersebut untuk memberikan Tablet Tambah Darah (TTD).

b. Pemberian PMT *Me Bu Gateng*, upaya penanggulangan stunting.

Program *mee Bu Gateng*, merupakan salah satu upaya Dinas Kesehatan, dan pemerintah gampong untuk mencegah stunting. *Me bu gateng* bertujuan agar ibu dan bayi di dalam kandungan mendapatkan gizi yang cukup guna untuk mencegah stunting sejak dini, Program *Bu Gateng* untuk ibu hamil di launching Desember 2019 lalu waktu itu Dr H Muzakkar A Gani SH MSi masih sebagai wakil bupati Bireuen.

Kegiatan lainnya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan konsultasi terkait kesehatan janin dan kandungan, juga diberikan menu isi piringku yang dikenal dengan istilah program *Bu Gateng*. Stunting bisa dicegah sejak dini dengan memastikan anak-anak sejak lahir mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi dari sejak lahir sampai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) terhitung dari mulai ada janin dalam kandungan ibu sampai dengan usia anak 2 tahun. Inovasi program *bu gateng* sampai saat ini terus berlanjut dan menjadi salah satu program pencegahan stunting Dinkes Bireuen. Akan tetapi walaupun program tersebut sudah dijalankan nyata masih banyak kasus stunting di Bireuen. (Rizki Yunanda & Richa Meliza et.al.,2022)

c. Pemberian PMT tambahan untuk bayi dan balita.

Pemberian PMT ini bertujuan untuk mencegah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi dan balita, yang dilakukan di posyandu satu kali setiap bulan oleh bidan desa dan tenaga kesehatan khusus bagian gizi dari pukesmas untuk memantau status gizi balita dan memantau apakah pmt di posyandu desa tersebut sudah dilakukan secara benar dan sesuai dengan aturan konsumsi yang di anjurkan di posyandu, untuk anggaran dana posyandu ini dibebankan kepada dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Responsivitas Tenaga Kesehatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) di Kecamatan Gandapura”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana responsivitas tenaga kesehatan dalam peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kecamatan Gandapura.
2. Apa saja hambatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kecamatan Gandapura.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responsivitas Tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak terhadap pertumbuhan gizi bayi dan balita di Kecamatan Gandapura.

2. Hambatan apa saja dalam memberikan responsivitas pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai pertumbuhan gizi bayi dan balita di Kecamatan Gandapura.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tenaga kesehatan dalam peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Gandapura.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan responsivitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kecamatan Gandapura.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menambah literatur, dan sumber informasi serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik.

2. Manfaat praktis:

- a. Puskesmas Gandapura diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan berfungsi secara optimal dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan jauh lebih baik lagi dari pada sebelumnya.
- b. Bidan Desa Semoga menjadi masukan yang bermanfaat agar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat lebih baik kedepannya.

- c. Kader Posyandu diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam menjalankan perannya dan membuka wacana yang ada di masyarakat
- d. Ibu bayi diharapkan agar dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana tata cara merawat bayi.